

**Strategi Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok Pada Masa  
Pandemi COVID-19 (2020-2022)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi gelar sarjana di  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

**RAMDHANA DWI MULYANI**

**E061191058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK PEMERINTAH TIONGKOK  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2022)

NAMA : RAMDHANA DWI MULYANI

NIM : E061191058

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

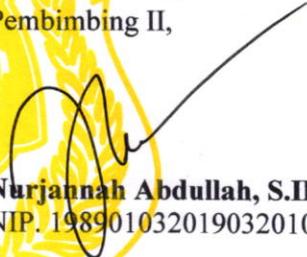
Makassar, 6 Desember 2023



Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.**  
NIP. 197210282005011002

  
**Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
**Aswin Baharuddin, S.IP, MA**  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK PEMERINTAH TIONGKOK  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2022)

N A M A : RAMDHANA DWI MULYANI

N I M : E061191058

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 21 November 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah,, S.IP, MA

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Ramdhana Dwi Mulyani

NIM : E061191058

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK PEMERINTAH TIONGGOK PADA  
MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2022)”**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi itu merupakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Desember 2023



Ramdhana Dwi Mulyani

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian dan Menyusun skripsi ini yang berjudul, “**Strategi Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok Pada Masa Pandemi COVID-19 (2020-2022)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik terkait substansi maupun penulisannya. Walaupun begitu, penulis tetap berharap skripsi ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional dan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap isu diplomasi publik.

Penulis juga menyadari penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para pembimbing, **Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing I, dan **Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP, MA.** selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal proses penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini berhasil diselesaikan;
2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D;**

3. Seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin;
4. Rektor Universitas Hasanuddin **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta jajarannya;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin **Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si.** beserta jajarannya;

Makassar, 15 Oktober 2023

Ramdhana Dwi Mulyani

## ABSTRAK

Ramdhana Dwi Mulyani, E061191058, “Strategi Diplomasi Publik Tiongkok Pada Masa Pandemi COVID-19 (2020-2022)”, di bawah bimbingan Ishaq Rahman S.IP., M.Si. selaku Pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi diplomasi publik Tiongkok pada masa pandemi COVID-19 2020 – 2022, dan bagaimana hasil yang dicapai dari diplomasi publik tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjelaskan strategi diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok sepanjang masa krisis pandemi COVID-19 dan hasil dari diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok tersebut. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik *library research*, dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, penelitian sebelumnya, halaman web, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik analisis kualitatif untuk kemudian menghasilkan narasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok pada masa krisis pandemi COVID-19 terbagi atas dua, yaitu: *COVID-19 crisis diplomacy (mask & vaccine diplomacy)*, dan optimalisasi media sosial. Berbagai retorika buruk yang dilontarkan kepada Tiongkok di masa awal meledaknya virus corona membuat Tiongkok memiliki urgensi untuk bertindak cepat dalam diplomasi publiknya, sehingga kemudian dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dibuktikan dengan terpenuhinya indikator yang penulis gunakan untuk mengukur keberhasilan diplomasi publik Tiongkok ini dan naiknya opini masyarakat dari beberapa negara terhadap Tiongkok menjadi lebih positif dari 2020-2022.

**Kata kunci:** Tiongkok, Cina, Diplomasi Publik Tiongkok, COVID-19, *vaccine diplomacy, mask diplomacy, twiplomacy, wolf warrior diplomacy.*

## **ABSTRACT**

*Ramdhana Dwi Mulyani, E061191058, “China’s Public Diplomacy Strategy During the COVID-19 Pandemic (2020-2022)”, under the guidance of Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. as Advisor I and Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. as Advisor II, Department of Internasional Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Hasanuddin.*

*This research aims to examine China's public diplomacy strategy during the COVID-19 pandemic 2020 – 2022, and the outcomes achieved through this public diplomacy. Using a qualitative method, this research explains the public diplomacy strategies employed by China throughout the COVID-19 crisis and the results of China's public diplomacy efforts. To gather the necessary data, this research employed library research techniques, which involved reviewing various references relevant to the research topic, such as books, academic journal articles, official documents, previous research, websites, and other sources related to the research topic. The collected data was then analyzed using qualitative analysis techniques to produce a narrative that answers the research questions.*

*The research findings indicate that China's public diplomacy strategy during the COVID-19 pandemic crisis can be divided into two categories: COVID-19 crisis diplomacy (mask & vaccine diplomacy) and social media optimization. Negative rhetoric directed at China during the early stages of the coronavirus outbreak prompted China to respond swiftly in its public diplomacy efforts, ultimately yielding satisfactory results. This is demonstrated by the fulfillment of the indicators used to measure the success of China's public diplomacy and the increased positive public opinion towards China in various countries from 2020 to 2022.*

**Keywords:** *China, China’s Public Diplomacy, COVID-19, vaccine diplomacy, mask diplomacy, twiplomacy, wolf warrior diplomacy.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Diplomasi Publik .....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>31</b>
A. Perkembangan Urusan Luar Negeri ( <i>Foreign Affairs</i> ) Tiongkok.....	31
B. COVID-19 dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Diplomasi Publik Tiongkok.....	41
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Strategi Diplomasi Publik Tiongkok .....	47
B. Hasil Diplomasi Publik Tiongkok .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Jumlah tweet harian terkait Tiongkok dalam pandemi COVID-19.....	5
<b>Gambar 2.</b> Proporsi tweet harian terkait dengan setiap aspek.....	7
<b>Gambar 3.</b> Distribusi sentimen tingkat aspek secara keseluruhan dari bulan Januari hingga Mei di kalangan masyarakat umum.....	8
<b>Gambar 4.</b> Alur Berpikir.....	13
<b>Gambar 5.</b> Tweet Lijian Zhao yang mengutip sebuah artikel .....	44
<b>Gambar 6.</b> Akun resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok menginformasikan pendistribusian vaksin.....	56
<b>Gambar 7.</b> Contoh penggunaan tagar oleh akun resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok (@MFA_China).....	58
<b>Gambar 8.</b> Salah satu kicauan kontroversial Zhao Lijian.....	60
<b>Gambar 9.</b> Kicauan kontroversial Pemerintah Tiongkok.....	60
<b>Gambar 10.</b> Kicauan akun resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok.....	62
<b>Gambar 11.</b> Jenis Pesan Era Pandemi oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Brazil, Februari 2020 – Maret 2021.....	63
<b>Gambar 12.</b> Penggunaan Tagar oleh Akun Twitter Pemerintah Tiongkok .....	64
<b>Gambar 13.</b> Respon terhadap Manajemen Tiongkok dalam Menangani COVID-19 di 2020.....	68
<b>Gambar 14.</b> Respon terhadap Manajemen Tiongkok dalam Menangani COVID-19 di 2021.....	69
<b>Gambar 15.</b> Akumulasi Peningkatan Pandangan Positif terhadap Tiongkok dari tahun 2020 – 2021.....	70

<b>Gambar 16.</b> Peningkatan Pandangan Positif terhadap Cara Tiongkok. Merespon Pandemi.....	71
<b>Gambar 17.</b> Pandangan mengenai cara Tiongkok menangani pandemi masih lebih positif dibandingkan upaya AS .....	72

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Indikator Keberhasilan Suatu Diplomasi Publik.....	15
<b>Tabel 2.</b> Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak negara di dunia semakin menaruh perhatian kepada pelaksanaan *soft power* mereka, karena melihat peluang untuk mencapai kepentingan melalui strategi ini sangat menjanjikan. Negara memanfaatkan diplomasi publik dengan baik sebagai pendorong tersampainya ide dan cita-cita negara terhadap negara lain. Diplomasi publik dilakukan oleh pemerintah sebuah negara sebagai upaya untuk berkomunikasi dan memberi pengertian kepada masyarakat dari negara lain mengenai ide, prinsip, budaya, maupun tujuan dan kebijakan nasional mereka (Tuch, 1990). Salah satu negara yang sedang gencar meluaskan pengaruhnya dengan diplomasi publik adalah Tiongkok, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 pertama kali dideklarasikan sebagai pandemi pada bulan Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO). COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan, disebabkan oleh virus SARS-COV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan (W. A. Chen, 2021). Akibat dari menyebarnya virus ini ke seluruh dunia, membuat setiap orang merasakan kesulitan yang sama mulai dari adanya karantina massal, kota bahkan negara di-*lockdown* hingga memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi (Wang et al., 2021) baik dari sisi mikro maupun makro.

Munculnya tantangan besar yang dihadapi dunia yaitu pandemi virus COVID-19 menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan pengaruh yang

cukup besar dekade ini kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena virus pertama kali di temukan di Wuhan, melainkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menangani pandemi dan bagaimana Tiongkok memanfaatkan situasi yang menyedihkan menjadi sebuah peluang (Lin et al., 2021). Hal ini berkaitan dengan objektif atau tujuan yang dimiliki Tiongkok dalam menjalankan urusan luar negerinya terkait *country image*-nya (citra negara) yang terpengaruh oleh munculnya COVID-19.

Citra negara mengacu pada persepsi publik tentang suatu negara, yang melibatkan beberapa aspek, seperti politik, ekonomi, diplomasi, dan budaya. Sejumlah penelitian telah mengungkapkan bahwa citra negara memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Citra suatu negara sering berubah ketika peristiwa publik global terjadi, seperti peperangan, wabah penyakit, dan acara olahraga internasional. Dalam hal ini, yaitu merebaknya COVID-19 beberapa waktu lalu di seluruh dunia. Pada 21 Juni 2020, lebih dari 8,8 juta kasus dilaporkan ke WHO dengan lebih dari 465.000 kematian (Chen et al., 2021). Dalam hal ini, mempertahankan keberlangsungan hidup khalayak dalam situasi pandemi melibatkan keseimbangan antara keselamatan publik, ekonomi, dan kebebasan serta privasi pribadi, dan semua sektor masyarakat.

Hal-hal tersebut yang terjadi pada masa awal merebaknya virus kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di khalayak yang kemudian akan memengaruhi citra dan persepsi masyarakat. Seperti, apakah hal ini dapat ditangani dengan cukup menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika bepergian dan berinteraksi dengan manusia lain, ataukah perlu

digunakan alat pelacak pada pasien terdampak, dsb. Keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah, akan memengaruhi persepsi dan pandangan publik terhadapnya, yang menurut Bavel et al. (2020) pandemi tidak hanya menyebabkan korban tewas dan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga memengaruhi perilaku dan pendapat individu. Misalnya, salah satu masalah yang paling menonjol adalah meningkatnya sentiment intoleran, tidak simpatik, dan sentiment negatif yang diungkapkan terhadap suatu kelompok (Lyu & Takikawa, 2022). Karena wabah awal dan peran khususnya dalam menanggapi COVID-19, penulis menganggap Tiongkok sebagai perwakilan yang cocok untuk melakukan studi tentang citra negara dan diplomasi publik Tiongkok pada era pandemi COVID-19.

Berbicara tentang sentimen negatif khalayak global terhadap Tiongkok, tentu ada yang memicu munculnya sentiment negatif tersebut. Dalam hal ini, media berperan besar dalam membentuk opini publik, karena salah satu cara publik memahami masalah biasanya tergantung pada bagaimana konten di media disajikan (Vreese et al., 2011). Sejak kasus infeksi pertama kali teridentifikasi di Tiongkok, Tiongkok telah secara konsisten dan langsung dikaitkan dengan virus tersebut selama pandemi COVID-19, menggunakan strategi penamaan yang sangat negatif dan bias, seperti ‘virus corona Tiongkok’ atau ‘virus Wuhan’, atau bahkan informasi yang salah dan teori konspirasi yang mengandung narasi dan istilah negatif seperti ‘virus corona 5G’ dan beberapa ‘bioterror’ ketika merujuk pada Tiongkok dan pandemi yang sedang merajalela (Pennycook et al., 2020). Hal tersebut lah yang kemudian memperkuat kecenderungan xenofobia dan rasisme terhadap Tiongkok (Reny

& Barreto, 2022). Kerangka media khas lainnya yang menimbulkan ekspresi sentimen anti-Tiongkok berkaitan dengan politik dan hubungan internasional Tiongkok, termasuk pernyataan kerahasiaan Tiongkok dan keterlambatan tanggapan Tiongkok terhadap COVID-19 dan kritik terhadap '*mask diplomacy*' Tiongkok (Jaworsky & Qiaoan, 2021).

Diskriminasi yang ditargetkan terhadap orang Asia meningkat selama pandemi. Di Amerika Selatan (AS), negara-negara dengan kasus terinfeksi paling tinggi (misalnya, California, New York) terjadi peningkatan yang signifikan. Pada akhir 2020, Komisi Hak Asasi Manusia Kota New York menerima 248 laporan pelecehan dan diskriminasi, dengan lebih dari separuh korban adalah keturunan Asia. Klaim tersebut mencakup diskriminasi berdasarkan ras dan asal negara di beberapa bidang termasuk perumahan, akomodasi hotel, dan pekerjaan (Noble, 2020).

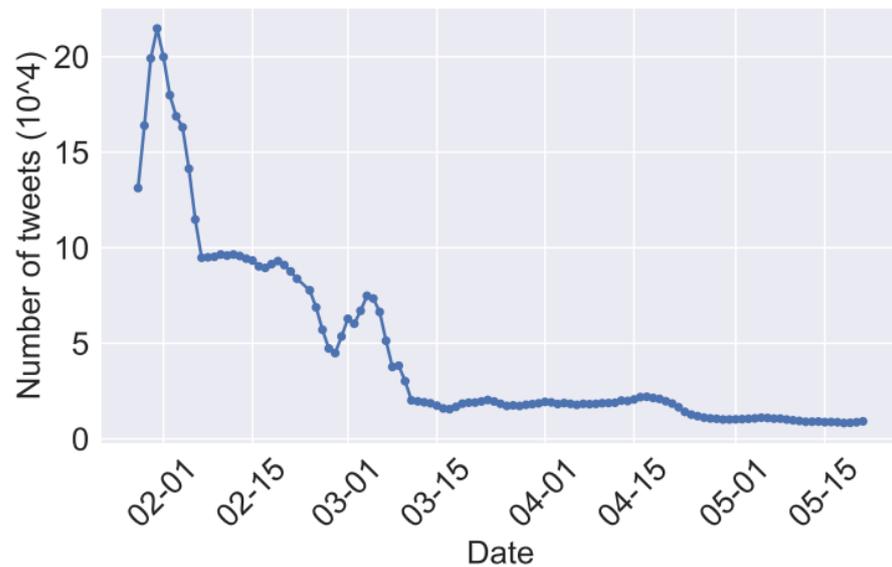
Selain itu, sentimen-sentimen masyarakat di masa lalu (pre-covid) muncul kembali mengenai masyarakat dan wilayah Tiongkok yang tidak sehat dan kotor. Stereotip ini dikaitkan dengan kota-kota besar yang kelebihan penduduk di Tiongkok dan Pecinan dengan kepadatan tinggi di negara lain. Stigma tambahan mengenai "kebiasaan dan makanan aneh" di daerah tersebut juga ikut beredar (Kandil, 2020). Di Korea Selatan, prasangka terhadap orang Tionghoa meningkat, dan stereotip bahwa orang Tiongkok berisik dan tidak higienis turut muncul ke permukaan (Kasulis, 2020). Ketika stereotip ini meningkat, semakin besar kemungkinan terjadinya stigmatisasi dari luar kelompok dan respon perilaku negatif. Meningkatnya agresi terhadap orang-orang Asia menunjukkan bahwa stereotip meningkat dalam skala global.

Warga Amerika keturunan Asia, yang sebagian besarnya belum pernah mengunjungi tanah leluhur mereka atau bahkan bukan keturunan Tionghoa, menghadapi tuduhan dan reaksi keras atas penyebaran virus ini (Scheimer & Chakrabarti, 2020).

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2021), citra negara Tiongkok pada masa pandemi paling sesuai jika dilakukan berdasarkan respon publik di sosial media. Dalam penelitian tersebut, dinilai bahwa dengan pertumbuhan pesat sosial media saat ini seperti Facebook, Twitter, dan Reddit, menjadikan citra negara dapat diteliti secara langsung dan transparan dari respon publik. Secara khusus, disuksi online dianggap sebagai tempat utama bersarangnya populisme *right-wing* dan xenofobia dan dengan demikian juga terkait dengan penyebaran sentiment anti-Tiongkok dalam konteks pandemi COVID-19 (Lyu & Takikawa, 2022). Dalam hal ini, digunakan Twitter sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian tersebut (Chen et al., 2021), dihitung jumlah tweet harian yang melibatkan Tiongkok dalam pandemi COVID-19 (Gambar 1). Seperti yang ditunjukkan, dapat dilihat terjadi penurunan keseluruhan dari angka-angka terkait Tiongkok setelah penyeabran awal virus pada akhir Januari, karena pandemi secara bertahap berkembang di Tiongkok dan mulai menyebar secara global. Selain itu, satu peningkatan pada awal Maret ketika WHO meningkatkan risiko COVID-19 menjadi “sangat beresiko”.

**Gambar 1.** Jumlah tweet harian terkait Tiongkok dalam pandemi COVID-19

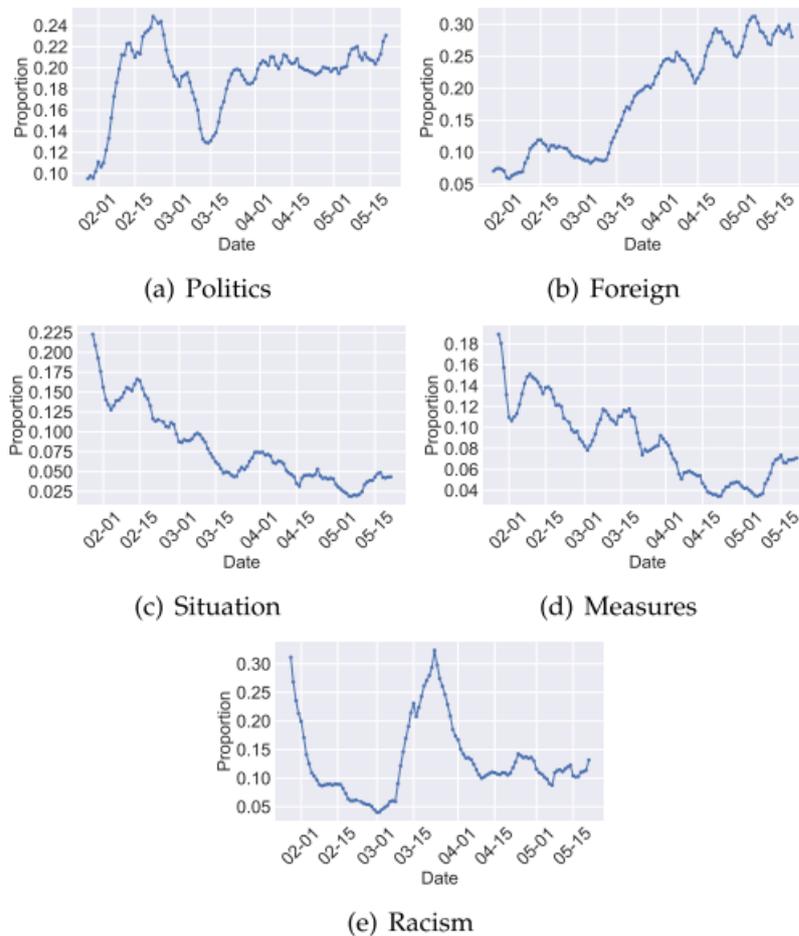


**Sumber:** Chen et al. (2021)

Secara khusus, proporsi tweet terkait politik mengalami penurunan pada akhir Februari, tetapi muncul lagi pada pertengahan Maret. Pada Gambar 2 dapat dilihat proporsi tweet terkait urusan luar negeri menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, dengan pertengahan Maret sebagai titik peningkatan tercepat. Terkait rasisme, proporsinya terus meningkat dari awal Maret hingga pertengahan Maret, diikuti oleh penurunan pada akhir Maret sementara secara konsisten lebih tinggi daripada sebelum pertengahan Maret. Salah satu alasan perubahan besar pada bulan Maret adalah bahwa Presiden AS Donal Trump menggunakan istilah “Virus Cina” di dalam tweet-nya yang mana hal ini memicu meningkatkan diskusi rasisme di Twitter. Dalam konteeksi lokasi wabah dan langkah-langkah anti-wabah, yang merupakan dimensi factual Tiongkok, proporsi negative terkait hal tersebut menurun selama berbulan-bulan. Salah satu interpretasi yang dapat diambil adalah

bahwa upaya Tiongkok dalam menangani penyebaran virus dan pandemi secara bertahap mulai terkendali.

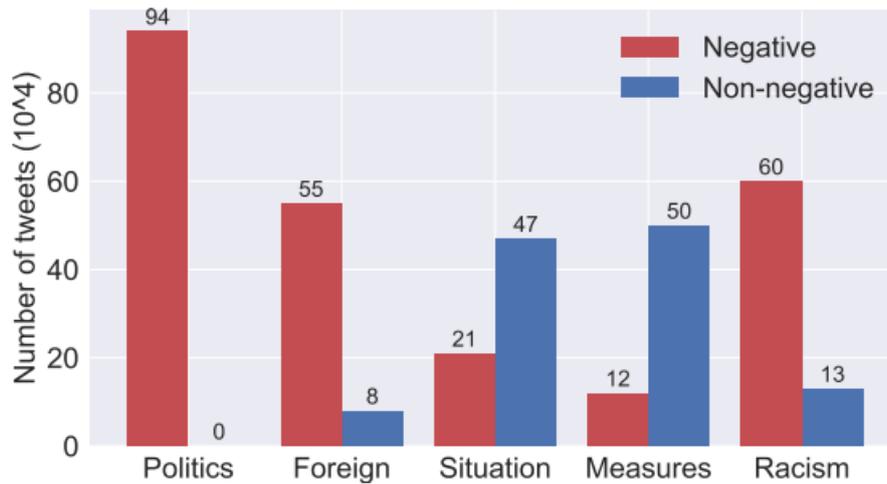
**Gambar 2.** Proporsi tweet harian terkait dengan setiap aspek (mengambil rata-rata 7 hari).



**Sumber:** Chen et al. (2021)

Dalam aspek terkait dengan ideologi, termasuk politik, urusan luar negeri, dan rasisme, tweet negatif memiliki kuantitas lebih tinggi daripada yang non-negatif. Namun, dalam aspek yang terkait dengan urusan factual, yaitu situasi wabah dan tindakan anti-wabah, tweet non-negatif lebih besar daripada yang negatif.

**Gambar 3.** Distribusi sentimen tingkat aspek secara keseluruhan dari bulan Januari hingga Mei di kalangan masyarakat umum.



**Sumber:** Chen et al. (2021)

Dari penelitian tersebut, terlihat sentimen-sentimen negatif masyarakat global terhadap Tiongkok nyata adanya. Karena dilakukan dengan secara manual membuat kumpulan *dataset* Twitter dengan terperinci mengenai citra negara Tiongkok, yang mana setiap tweet diberi label dengan aspek dan sentimen yang sesuai. Maka dari itu, penulis memutuskan mengambil topik penelitian ini karena Tiongkok yang juga memanfaatkan media sosial sebagai media diplomasi publiknya.

Kemudian, dalam rangka mengatasi citra negaranya yang terpengaruh kearah negatif, diperlukan tindaklanjut menggunakan diplomasi publik. Dalam menjalankan diplomasi publiknya perlu dahulu diketahui objektif yang diterapkan Tiongkok dalam menjalankan politik luar negerinya. Objektif Tiongkok dalam menjalankan urusan luar negerinya dalam hal ini diplomasi publik berkaitan dengan bagaimana mempromosikan budaya dan Bahasa, menekankan imej positif pada khalayak internasional, meningkatkan

perdagangan dan kerja sama internasional dengan negara lain, serta untuk menopang atau mendukung negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan (Kanwal, 2022). Objektif-objektif tersebut berangkat dari kalimat “*telling China’s story well*” yang dilontarkan oleh Presiden Xi Jinping pada *National Propaganda and Ideology Work Conference* di tahun pertamanya menjabat pada 2013 (China Media Project, 2021), sebagai ambisi dan inovasinya untuk membangun Tiongkok yang baru dengan melakukan banyak komunikasi ke luar dan menekankan pada aspek “*external propaganda*”.

Dari jargon tersebut, terdapat 4 aspek yang ingin disampaikan oleh Xi Jinping, namun seringkali disalahartikan secara literal. Dikutip dari China Media Project (2021), seorang ketua *All-China Women’s Federation* Provinsi Fujian, Xu Shana (2020) menerjemahkan maksud sesungguhnya dari “*telling China’s story well*” oleh Xi Jinping dan menerjemahkannya ke dalam 4 aspek, antara lain:

Yang pertama, *The Party*, tentang bagaimana gambaran *Chinese Communist Party* (CCP) haruslah tampak sebagai partai yang sangat kompeten. Hal ini sangat terlihat dari performa Tiongkok selama pandemi dengan segala bantuan yang disediakan serta unggulnya sistem politik Tiongkok saat bergulat dengan krisis COVID-19.

Yang kedua, *The Dream*, kalimat Xi Jinping tersebut mengartikan bahwa politik luar negeri Tiongkok harus bisa menyampaikan tentang “*the struggle of the Chinese people to fulfill their dream*”. “*Telling China’s dream*” dengan baik adalah tentang menyampaikan mimpi kemakmuran nasional (*national*

*prosperity, national rejuvenation*) dan kebahagiaan rakyat (*the happiness of the people*). Untuk menceritakan “*China’s dream*” secara komprehensif dan akurat perlu diperjelas bahwa isi esensial dari mimpi ini adalah kemakmuran negara, revitalisasi bangsa, dan kebahagiaan rakyat. Hal ini dikatakan dapat diterima audiens luar negeri karena kalimat “*the struggle of the Chinese people*” memiliki arti “*a dream of peace, development, cooperation and win-win*” yang menunjukkan bahwa inti dari kebijakan luar negeri Tiongkok adalah mewujudkan dunia yang dapat menguntungkan semua pihak. Berangkat dari hal ini kemudian muncul *Belt and Road Initiative* dan lahirnya “*wolf warrior diplomacy*” (China Media Project, 2021) yaitu strategi diplomasi yang menggabungkan *offense* dan *defense*, diadopsi dari konsep Mao Zedong yang tujuannya adalah untuk mengikuti nilai-nilai dari publik yang menjadi target dan untuk mengorientasikan serta mengkoordinasikan opini publik guna “bersatu dengan semua kekuatan yang dapat dipersatukan” (Huang, 2022).

Yang ketiga, *The Culture*, Xi Jinping menilai sangat penting untuk menggunakan budaya tradisional untuk menyampaikan *the “true”, the “good”, dan “the beautiful”* dari Tiongkok kepada dunia. Namun hal ini dikritik oleh Zhou Hong, seorang direktur dari *Cultural Division of the Overseas Chinese Affairs Office of the State Council* yang mengatakan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan oleh pemerintah Tiongkok terlalu kental akan warna pemerintah dan karena pemerintah Tiongkok memiliki keyakinan bahwa budaya sama dengan seni sehingga menjadikan opini publik asing pada budaya Tiongkok hanyalah sebatas menyanyi dan menari.

Yang keempat, *Win-win Cooperation*, Xi Jinping berusaha memberitahu dunia bahwa kebangkitan Tiongkok bersifat damai, dan tujuan fundamentalnya adalah untuk membangun “*community of common destiny for mankind*” di mana semua negara dan orang-orang di dalamnya dapat ikut merasakan manfaat. Hal ini juga dimaksudkan untuk mematahkan stereotip Barat tentang “*China Threat Theory*”, serta untuk menunjukkan Tiongkok sebagai model yang seharusnya dikagumi dan ditiru oleh dunia.

Melalui objektif dan cita-cita ambisius Tiongkok tersebut serta terancamnya opini publik karena virus yang ditemukan di Wuhan (W. A. Chen, 2021), membuat Tiongkok melihat sebuah peluang untuk meningkatkan strategi diplomasi publiknya. Saat pandemi sedang pada puncak terparahnya, Tiongkok dinilai berhasil menciptakan kesan yang baik. Hal ini ditandai oleh pidato dari Presiden Serbia dan Menteri Luar Negeri Italia (Kanwal, 2022) yang mengatakan bahwa pada saat-saat paling membutuhkan, bukan Eropa, melainkan hanya Tiongkok yang memberikan bantuan.

Bukan hanya Serbia dan Italia, Tiongkok melalui misalnya *coronavirus diplomacy* dan *mask diplomacy* banyak membantu negara-negara lain yang membutuhkan, dan hal tersebut berhasil membuat Tiongkok menampilkan superioritinya dalam menangani COVID-19 (W. A. Chen, 2021). Tidak lupa *wolf warrior diplomacy*-nya di media sosial guna menampik narasi palsu dan membentuk ulang opini publik (Huang, 2022) yang memanas di masa awal pandemi.

Usaha-usaha yang dilakukan Tiongkok tersebut menarik banyak perhatian akademisi, dikarenakan kelihaihan Tiongkok dalam memanfaatkan dan memutarbalikkan keadaan yang tidak menguntungkan menjadi sebuah peluang. Maka dari itu juga penulis tertarik membuat penelitian ini yang berjudul **Strategi Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok Pada Masa Pandemi COVID-19 (2020-2022)** untuk mengetahui dan membahas diplomasi publik Tiongkok di masa pandemi COVID-19 secara lebih lengkap.

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis akan membatasi penelitian ini dengan berfokus pada rangkaian diplomasi publik yang dilakukan pemerintah Tiongkok di masa pandemi COVID-19 dan hasil yang didapatkan dari rangkaian diplomasi publik tersebut. Sehingga, batasan masalah tersebut melahirkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diplomasi publik Tiongkok pada masa pandemi COVID-19? dan,
2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Tiongkok pada masa pandemi COVID-19?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui cara Pemerintah Tiongkok melaksanakan diplomasi publiknya pada masa COVID-19.

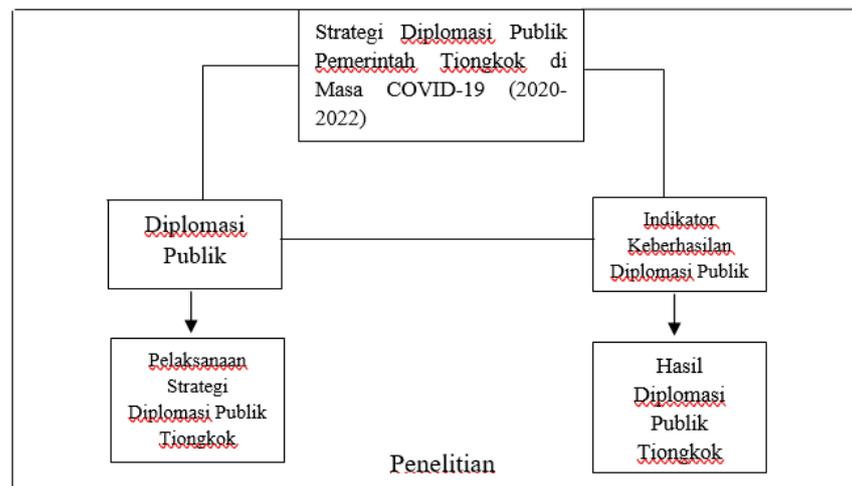
2. Mengetahui bagaimana hasil dari diplomasi publik yang dijalankan Pemerintah Tiongkok tersebut.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut, yakni:

- a) Dapat pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa/i program studi Hubungan Internasional mengenai strategi diplomasi publik Pemerintah Tiongkok pada masa COVID-19, serta bagaimana hasil dari strategi tersebut.
- b) Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa/i yang ingin meneliti hal serupa atau berhubungan dengan *soft power*, maupun diplomasi publik.

#### D. Kerangka Konseptual

**Gambar 4.** Alur Berpikir



**Sumber:** Diolah oleh Peneliti

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka akan digunakan konsep diplomasi publik. Diplomasi Publik digunakan untuk menjelaskan rangkaian

strategi diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok di masa COVID-19 serta untuk menjelaskan hasil yang didapatkan Tiongkok atas rangkaian strategi diplomasi publiknya dengan indikator keberhasilan diplomasi publik oleh Mark Leonard et al.

## **1. Diplomasi Publik**

Diplomasi publik merupakan konsep dalam studi hubungan internasional yang lahir sejak tahun 1960-an di masa Perang Dingin. Sebuah terminologi baru untuk mendeskripsikan aspek lain dari hubungan internasional (Chahine, 2011). Diplomasi publik merupakan proses menyampaikan kebijakan aktor internasional kepada warga asing. Warga asing yang dimaksud dapat mencakup perwakilan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan multinasional, jurnalis dan lembaga media, pakar dari berbagai sektor, politik dan budaya, serta anggota masyarakat umum di negara lain. Diplomasi Publik biasanya melibatkan pemangku kepentingan seperti kementerian luar negeri, LSM dan organisasi masyarakat sipil melalui metode komunikasi seperti media, konferensi dan acara, proyek kolaborasi dan budaya, pertukaran staf atau mahasiswa (Pamment, 2012).

Hans Tuch (2005) mendefinisikan diplomasi publik sebagai proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya untuk mewujudkan pemahaman tentang ide dan cita-cita bangsanya, institusi dan budayanya, serta tujuan dan kebijakan nasionalnya. Frederick (1993) secara lebih spesifik menambahkan: kegiatan, yang diarahkan ke luar negeri dalam bidang informasi, pendidikan, dan budaya, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemerintah asing, dengan/melalui mempengaruhi warga

negaranya. Signitzer dan Coombs (1992) berpendapat bahwa *public relations* dan diplomasi publik sangat mirip karena sama-sama mencari tujuan yang sama dan menggunakan alat yang serupa. Mereka mendefinisikan diplomasi publik sebagai cara di mana individu dan kelompok pemerintah dan swasta mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung sikap dan opini publik yang secara langsung mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri pemerintah lain. Kemudian, Wang (2006) mengemukakan bahwa “mengelola reputasi nasional” adalah konsep kunci dalam diplomasi publik. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam usahanya meningkatkan pengaruh dan citranya di masa pandemi, yakni berkomunikasi dengan publik asing dan meningkatkan reputasi nasionalnya.

Dalam melaksanakan strategi diplomasi publik, tentu bertujuan agar hasil yang didapatkan berupa keberhasilan. Maka untuk menentukan apakah sebuah strategi itu berhasil, diperlukan sebuah indikator. Pada penelitian ini, digunakan hierarki dampak yang dapat dicapai oleh diplomasi publik oleh Mark Leonard et al (Leonard et al., 2002) sebagai indikator keberhasilan suatu diplomasi publik. Diplomasi publik dapat dikatakan berhasil ketika mencapai hal-hal berikut:

**Tabel 1.** Indikator Keberhasilan Suatu Diplomasi Publik

No	Strategi	Tujuan
1.	Dicapai dengan melakukan sesuatu yang membuat suatu negara menjadi perbincangan,	Meningkatkan familiaritas masyarakat asing terhadap negara.

	<p>sehingga semakin sering didengar, dilihat, maka semakin sering dipikirkan. Dengan begitu, masyarakat asing akan lebih familiar terhadap suatu negara, sehingga dapat membalikkan opini yang tidak baik dan memperbarui citra negeri.</p>	
2.	<p>Dicapai dengan menciptakan persepsi positif, dan membuat masyarakat asing melihat isu-isu kepentingan global dari perspektif yang sama.</p>	<p>Meningkatkan apresiasi masyarakat asing terhadap negara.</p>
3.	<p>Dicapai dengan memperkuat ikatan dengan banyak negara terutama yang menjadi target diplomasi publik itu sendiri. Dapat dilakukan melalui pendidikan dan kerja sama ilmiah, memancing masyarakat asing agar melihat suatu negara ini sebagai tujuan yang menarik untuk pariwisata atau studi, serta meningkatkan</p>	<p>Meningkatkan keterlibatan masyarakat asing di dalam negeri.</p>

	kualitas produk negeri.	
4.	Dicapai dengan terus melakukan tiga hal sebelumnya sehingga masyarakat asing akan terpengaruh dan memihak posisi negara kita.	Meningkatkan investor, publik yang mendukung posisi kita, atau politisi yang memilih negara kita sebagai mitra.

**Sumber:** Mark Leonard et al. (2002)

Mengacu pada beberapa definisi yang telah di jabarkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa diplomasi publik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena dampak yang didapatkan ketika diplomasi publik itu berhasil sangat menguntungkan. Ketika diplomasi publik berhasil maka sebuah negara akan mendapatkan situasi seperti meningkatnya reputasi nasional, meningkatnya lingkup kerja sama internasional, roda perputaran ekspor-impor dan majunya sektor pariwisata dan turisme yang pastinya berdampak baik pada perekonomian negara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang tujuannya untuk memahami serta menafsirkan berbagai fenomena sosial. Dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar yang kemudian menghasilkan penjelasan deskriptif terkait fenomena yang diteliti (Bakry, 2016). Dengan penelitian

kualitatif, penelitian ini akan menjelaskan strategi diplomasi publik Pemerintah Tiongkok pada masa pandemi COVID-19.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data yang bukan dibuat dan dikumpulkan langsung oleh penulis, melainkan oleh pihak lain dengan maksud berbeda (Boslaugh, 2007). Berikut data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan internet/laman web yang memuat tentang COVID-19, *country image*, diplomasi vaksin, diplomasi kesehatan, diplomasi *wolf-warrior* diplomasi Twitter, dan diplomasi publik Tiongkok.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yakni penelitian yang dilakukakn dengan mengkaji berbagai literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian (Sarwono, 2006). Referensi yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian berbasis dokumen (*document-based research*) dan penelitian berbasis internet (*internet-based research*).

## **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, di mana data akan diolah untuk kemudian menghasilkan narasi yang mampu menjawab pertanyaan penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** memuat deskripsi teoritis terkait konsep yang digunakan, yaitu diplomasi publik, serta uraian terkait beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan serta menjadi landasan penelitian.

**BAB III GAMBARAN UMUM** memuat penjelasan mengenai sejarah diplomasi Tiongkok hingga masa kontemporer dan keadaan politik dunia saat pandemic COVID-19.

**BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN** berisikan hasil penelitian yang sebelumnya telah melalui proses implementasi konsep dan telah menemukan jawaban dari rumusan masalah dengan berlandaskan data-data yang telah dikumpulkan.

**BAB V PENUTUP** berisi rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan akan menjawab rumusan masalah dan saran terkait topik yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Diplomasi Publik

Seiring berkembangnya zaman, maka perilaku aktor dalam hubungan internasional kian berevolusi. Hal ini ditandai dengan bagaimana para aktor hubungan internasional dewasa ini lebih akrab dengan metode persuasif dibandingkan metode agresif saat berusaha menjalankan kebijakan-kebijakan dan aktivitas luar negerinya. Salah satu metode atau strategi yang akrab dilakukan ialah diplomasi. Stephen McGlinchey (2017) seorang pengajar senior di UWE Bristol menyebutkan di artikelnya bahwa diplomasi dapat didefinisikan sebagai proses antara aktor (diplomat—biasanya mewakili negara, atau para petinggi negara lainnya) yang ada dalam suatu sistem hubungan internasional dan terlibat dalam dialog pribadi dan publik untuk mencapai tujuan mereka dengan cara damai. Strategi mewujudkan kebijakan luar negeri dengan diplomasi atau metode persuasif ini kian populer sejak setelah Perang Dunia II karena dinilai efektif dalam mencapai tujuan dengan resiko kerusakan yang sangat minimal.

Hal ini sesuai dengan konsep *soft power* yang diciptakan oleh sarjana hubungan internasional Joseph Nye (2008), yang bagi banyak orang, telah menjadi konsep inti dalam studi diplomasi publik. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai “kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui ketertarikan daripada paksaan atau pembayaran.” Dengan kata lain, *soft power* adalah sejauh mana aset budaya, cita-cita politik, dan kebijakan aktor politik

menginspirasi rasa hormat atau kedekatan di pihak lain. Dengan demikian, *soft power* telah dilihat sebagai sumber daya, dengan diplomasi publik sebagai mekanisme yang berupaya memanfaatkan sumber daya *soft power*.

Diplomasi publik merupakan komunikasi antara aktor negara maupun non negara dengan publik asing, yang di dalamnya ada proses menginformasikan, mempengaruhi, membangun hubungan jangka panjang serta mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri. Istilah ini diperkenalkan secara luas pada pertengahan 1960-an oleh seorang diplomat Amerika Serikat, Edmund Gullion (USC Center on Public Diplomacy, 2022), dengan maksud untuk memisahkan aktifitas informatif pemerintahan dari istilah propaganda yang mulai melahirkan konotasi negatif. Namun sebelum 1960-an oleh Gullion, istilah diplomasi publik muncul dipermukaan pada sebuah artikel oleh *London Times* di tahun 1856 (Cull, 2020) yang mengkritik sikap Presiden Franklin Pierce, yang berbunyi:

*“The statesmen of America must recollect,” the Times opined, “that, if they have to make, as they conceive, a certain impression upon us, they have also to set an example for their own people, and there are few examples so catching as those of public diplomacy.”*

Kemudian pada Januari 1871 *New York Times* untuk pertama kalinya menggunakan istilah diplomasi publik di dalam artikelnya ketika meliput debat Kongres. Terbitnya artikel oleh *New York Times* ini yang kemudian mengantar penggunaan istilah diplomasi publik pada Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I istilah diplomasi publik digunakan secara luas untuk menggambarkan praktik-praktik diplomasi baru. Mulai dari pernyataan Jerman seputar kebijakan perang kapal selam melalui deklarasi publik tentang

ketentuan perdamaian, hingga visi idealis Woodrow Wilson—seperti yang diungkapkan dalam poin pembukaan pidatonya “empat belas poin” pada 8 Januari 1918—bagi seluruh sistem internasional yang didasarkan pada “*open covenants of peace, openly arrived at*” yang berarti perjanjian perdamaian terbuka, tiba secara terbuka (Cull, 2020). Walaupun banyak penulis pada saat itu lebih menyukai ungkapan *open diplomacy* atau diplomasi terbuka untuk menggambarkan rangkaian praktik-praktik diplomasi baru ini, tetapi frasa diplomasi publik telah memiliki audiensnya sendiri seperti di Perancis yang menggunakan frasa “*diplomatie publique*”.

Sejak penggunaan pertama kali oleh *New York Times* di tahun 1871 dan secara berkala digunakan oleh pemimpin dunia untuk mendeskripsikan praktik diplomasi baru pada Perang Dunia I, penggunaan kedua istilah ini oleh *New York Times* berlanjut secara berurutan di tahun 1916 dalam artikelnya tentang Perjanjian Sussex, sebuah deklarasi yang dikeluarkan pada 4 Mei oleh pemerintah Jerman untuk membatasi perang kapal selamnya, kemudian di tahun 1917 yang mengutip artikel dari editorial lain yaitu *Berliner Tageblatt* dan mengomentari negosiasi perdamaian Rusia-Jerman di Brest -Litovsk (Cull, 2020). Artikel tersebut berbunyi: “*Nothing can so shake the wall of arms as the new public diplomacy.*”

Sejak saat itu, terutama beberapa dekade belakangan, diplomasi publik secara luas dipandang sebagai cara sebuah negara berdaulat berkomunikasi dengan publik asing secara transparan untuk mempromosikan kepentingan nasional dan meningkatkan pencapaian kebijakan luar negerinya.

Namun begitu, diplomasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi state-to-state antar para diplomat dan petinggi negara. Oleh karenanya, diplomasi publik termasuk namun tidak terbatas pada aktifitas-aktifitas seperti program pertukaran ilmuwan maupun pelajar, program pariwisata, pelatihan Bahasa, acara pertukaran budaya, dan acara radio atau televisi (USC Center on Public Diplomacy, 2022).

Tuch (1990) mendefinisikan diplomasi publik sebagai proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya untuk membawa pemahaman tentang gagasan dan cita-cita bangsanya, institusi dan budayanya, serta tujuan dan kebijakan. Frederick (1993) secara spesifik menambahkan bahwa diplomasi publik ialah semua kegiatan yang diarahkan ke luar negeri dalam bidang informasi, pendidikan, dan budaya, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemerintah asing, dengan mempengaruhi warga negaranya. Signitzer & Coombs (1992) berpendapat bahwa PR (*public relations*) dan diplomasi publik sangat mirip karena memiliki tujuan yang sama dan menggunakan alat yang serupa. Signitzer & Coombs mendefinisikan diplomasi publik sebagai cara di mana individu dan kelompok pemerintah dan swasta mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung sikap dan opini publik yang secara langsung mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri pemerintah lain.

Dengan adanya definisi-definisi tersebut, tidak menjadikan istilah “diplomasi baru”, “diplomasi publik”, dan “diplomasi media” mendapat makna yang spesifik. Istilah-istilah tersebut menjadi terlalu abstrak dan menjadi tidak tepat, maka diperlukan pemberian makna yang lebih spesifik.

Rawnsley (1995) membedakan antara diplomasi publik dan diplomasi media berdasarkan target audiens: yang pertama, menurutnya, pembuat kebijakan menggunakan media untuk menangani publik asing; dan yang kedua, mereka berbicara kepada pejabat pemerintah. Berdasarkan tujuan dan sarana, Gilboa (2001, 2002) membedakan antara, diplomasi publik di mana aktor negara dan non-negara menggunakan media dan saluran komunikasi lainnya untuk mempengaruhi opini publik di masyarakat asing, dan diplomasi media di mana pejabat menggunakan media untuk menyelidiki dan mempromosikan kepentingan bersama, negosiasi, dan penyelesaian konflik; dan diplomasi dengan perantara media, di mana jurnalis untuk sementara waktu dapat dikatakan berperan sebagai diplomat dan berfungsi sebagai mediator dalam negosiasi internasional (Gilboa, 2008).

Namun demikian, dengan tujuan untuk memperluas ruang lingkup diplomasi publik, para ahli mengembangkan konsep diplomasi publik baru (*new public diplomacy*) yang mendefinisikan diplomasi publik secara lebih luas daripada hanya sebagai kegiatan yang unik bagi negara berdaulat berdiplomasi. Pandangan ini bertujuan untuk menangkap tren yang muncul dalam hubungan internasional di mana berbagai aktor non-negara dengan posisi tertentu dalam politik dunia –organisasi supranasional, aktor sub-nasional, organisasi non-pemerintah, dan bahkan perusahaan swasta– berkomunikasi dan terlibat secara bermakna dengan publik asing dan dengan demikian mengembangkan serta mempromosikan kebijakan dan praktik diplomasi publik mereka sendiri (USC Center on Public Diplomacy, 2022).

Diplomasi publik baru juga didukung oleh adanya perkembangan teknologi dan terjadinya globalisasi. Sebab itulah Advokat diplomasi publik baru menunjuk pada demokratisasi informasi melalui media baru dan teknologi komunikasi sebagai kekuatan baru yang telah sangat memberdayakan aktor non-negara dan meningkatkan peran dan legitimasi mereka dalam politik internasional (USC Center on Public Diplomacy, 2022). Para pemimpin negara-negara berdaulat mengadopsi strategi ini karena selain dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan serta kebijakan nasional, juga dinilai lebih mengikuti perkembangan zaman dan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh lekatnya generasi saat ini dengan globalisasi dan teknologi (internet), yang kemudian dua hal ini membuat sistem-sistem di sekelilingnya mengakui bahwa hubungan, baik itu antar manusia hingga negara sudah tidak memiliki batas-batas yang berarti lagi. Film, radio, acara televisi, surat kabar, dan media-media luar negeri lainnya yang hanya bisa dinikmati ketika saluran yang dipilih merupakan saluran dalam negeri yang menampilkan berita-berita luar negeri. Namun dengan adanya internet menjadikan setiap orang yang memiliki jaringan internet bisa menikmati apa yang dinikmati oleh orang-orang di belahan dunia lain, bahkan berita-berita terkini bisa didapatkan secara *real-time*.

Hal tersebut kemudian menghasilkan diplomasi publik baru yang terjadi dalam sistem hubungan internasional menjadi sebuah sistem yang saling menguntungkan yang tidak lagi berpusat pada negara tetapi terdiri dari banyak aktor dan jaringan, beroperasi dalam lingkungan global yang cair dengan isu dan konteks baru (USC Center on Public Diplomacy, 2022). Munculnya

pandangan mengenai diplomasi publik baru secara implisit menjadi tanda dari signifikansi dari diplomasi publik itu sendiri secara umum.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan sejumlah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan konsep dan isu yang dikaji, sebagai landasan penelitian.

Penelitian pertama merupakan artikel berjudul *Building a Network to “Tell China Stories Well”: Chinese Diplomatic Communication Strategies on Twitter* yang ditulis oleh Zhao Alexandre Huang dan Rui dan dimuat dalam *International Journal of Communication* volume 13 dan diterbitkan tahun 2019. Artikel ini membahas tentang sebuah frasa yang diucapkan pertama kali oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, yakni “*Tell China Stories Well*” (jianghao zhongguo gushi). Frasa ini kemudian menjadi panduan penting pendekatan Tiongkok terhadap diplomasi publiknya, serta merupakan dorongan untuk menggunakan saluran komunikasi sendiri untuk secara resmi mempromosikan dan memperkuat pengaruh internasional Tiongkok. Artikel ini secara spesifik menganalisis aktifitas diplomasi publik Tiongkok di sosial media Twitter dengan menggunakan pendekatan *mixed-methods* (seperti *manual-coding*, *computer-assisted content analysis*, *network analysis*, dan *discourses analysis*). Dalam artikel ini juga dibahas mengenai struktur jaringan Twitter diplomatik Tiongkok, kolaborasi dan interaksi yang menjadi ciri jaringan itu sendiri dan strategi komunikatif yang digunakan pada akun-akun Twitter tersebut. Dalam artikel ini dijelaskan pemerintah Tiongkok telah mencoba menggunakan platform media sosial untuk memproyeksikan “*Chinese Dream*”. Tujuannya adalah untuk menampilkan, mempromosikan,

dan mendukung kejadian-kejadian tertentu (*specific events*) dari berbagai perspektif tanpa melanggar aturan sensor pemerintah. Praktisi diplomasi publik Tiongkok membawa berbagai sudut pandang dan suara ke dalam konten Twitter mereka sambil tetap menghormati aturan sensor pemerintah, untuk menciptakan citra online yang toleran, demokratis, dan bertanggung jawab oleh Tiongkok sang kekuatan global yang sedang bangkit (*rising global power*).

Penelitian kedua merupakan artikel yang berjudul *COVID-19 and China's Changing Soft Power in Italy* yang ditulis oleh Wei A. Chen dan dimuat dalam *Chinese Political Science Review* volume 3 dan diterbitkan pada Juli 2021. Artikel ini membahas terkait bantuan COVID-19 dari Tiongkok yang sering dipotret secara negatif di media Eropa, namun tidak demikian di Italia, yang dianalisis melalui laporan berita kedatangan bantuan China di surat kabar nasional selama periode Maret-April 2020. Melalui penilaian data sekunder yang dikumpulkan dari surat kabar, artikel ini berpendapat bahwa bantuan Tiongkok memungkinkan negara tersebut untuk meningkatkan visibilitasnya di Italia, terutama selama fase awal pandemi COVID-19. Bahkan jika tidak ada korelasi langsung antara visibilitas yang lebih tinggi dan peningkatan *soft power*, makalah ini menemukan bahwa peningkatan visibilitas di surat kabar nasional memungkinkan orang Italia melihat Tiongkok secara lebih positif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman Tiongkok tentang *soft power* masih mengalami perubahan besar dan bahwa seseorang seharusnya tidak hanya memahami bantuan Tiongkok sebagai cara untuk meningkatkan *soft power*-nya secara global, tetapi bantuan luar negeri tersebut dianggap sebagai

alat yang ampuh untuk meningkatkan keyakinan bahwa Tiongkok merupakan pemimpin global yang bertanggung jawab membantu dunia.

Penelitian ketiga merupakan artikel yang berbentuk *policy review* yang berjudul *Coronavirus (COVID-19) pandemic: Pros and cons of China's soft power projection* yang ditulis oleh Md. Farid Hossain dan dimuat dalam *Asian Politics and Policy* volume 13 no. 4 yang diterbitkan pada Mei 2021. Artikel ini membahas tentang bagaimana upaya Tiongkok dalam menangani COVID-19 mendapat persepsi yang beragam. Negara-negara berkembang merespon dengan tertarik kepada diplomasi kesehatan Tiongkok. Ketertarikan ini dapat membantu Tiongkok mencapai kebijakan luar negerinya, terutama menciptakan jejak ekonomi lebih lanjut ke negara-negara tersebut. Namun, citra Tiongkok menunjukkan kemunduran di negara-negara Eropa Barat termasuk Amerika Serikat. Melalui diplomasi kesehatan pandemi (*mask diplomacy, vaccine diplomacy*), Beijing berupaya mengubah persepsi dunia tentang penanganan wabah virus corona. Meskipun demikian, dalam artikel ini ditegaskan bahwa tingkat aktual dan dampak *soft power* Tiongkok terkait diplomasi kesehatan pandemi COVID-19 tetap sulit karena beberapa analisis memandang pasokan medis Tiongkok sebagai “*carrot*” (penawaran) alih-alih sebagai *soft power*.

Penelitian keempat merupakan artikel yang berjudul *China's Turn to Twiplomacy : Efforts to Counter Negative Narratives Online* yang ditulis oleh Irene Rahafi dan Ella Syafputri Prihatini, Ph.D dan dimuat dalam *7th North American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* oleh *IEOM Society International* dan diterbitkan pada Juni 2022.

Artikel ini membahas tentang berbagai upaya diplomat Tiongkok dalam menggunakan Twitter sebagai alat untuk melakukan propagandanya. Tiongkok yang dikenal sebagai negara yang lebih memilih diplomasi tradisional dengan tatap muka untuk menyampaikan narasinya ke luar negeri, kesulitan untuk melakukan kegiatan diplomasi tatap muka, dipaksa oleh keadaan dimana semua kegiatan diplomasi negara dilakukan secara online dan peran media sosial menjadi lebih penting untuk mengkomunikasikan isu-isu kebijakan luar negeri di seluruh dunia.

Penelitian kelima merupakan artikel berjudul “*“Wolf Warrior” and China’s digital public diplomacy during the COVID-19 crisis*” yang ditulis oleh Zhou Alexandre Huang dan dimuat dalam jurnal ilmiah *Place Branding and Public Diplomacy* volume 18 yang diterbitkan pada Oktober 2021. Artikel ini membahas tentang istilah “*Wolf Warrior*”. Istilah “*wolf warrior diplomacy*” adalah bentuk baru diplomasi publik Tiongkok yang telah menjadi alat penting bagi pemerintah Tiongkok dalam memerangi “stigmatisasi Tiongkok oleh media dan pemerintah Barat”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan politik luar negeri Tiongkok bergeser dari lembut namun defensif, dan konvergen, ke arah yang semakin keras, ofensif, dan agresif. Term ini memuat sentimen yang sangat nasionalis yang memberikan mekanisme serta kondisi untuk CCP (*Chinese Communist Party*) mempertahankan dominansi posisinya terhadap masyarakat Tiongkok dan menguasai diskursif power di panggung internasional. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa strategi diplomasi publik “*wolf warrior*” mengkombinasikan serangan dan pertahanan (*offense and defense*), yakni dengan bertindak keras

namun berbicara lembut (*act tough, talk soft*) Para diplomat Tiongkok sebagian besar telah mengadopsi strategi ini dalam praktik komunikasi Twitter mereka.

Penelitian keenam berjudul *Rise of Chinese Public Diplomacy during COVID-19 Era* yang ditulis oleh Maria Kanwal dan diterbitkan oleh *Fatima Jinnah Women University* pada tahun 2022. Penelitian ini cukup singkat membahas mengenai diplomasi Tiongkok secara umum dan diplomasi publiknya sebelum dan saat pandemi COVID-19 berlangsung, yang mana dibahas dua metode diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok, yakni *corona diplomacy* dan *mask diplomacy*.

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dengan penelitian ini ialah, selain berfokus pada strategi diplomasi publik apa saja yang dilakukan Tiongkok saat pandemi COVID-19 2020-2022, namun penelitian ini juga berusaha mengukur keberhasilan strategi-strategi diplomasi publik tersebut Tiongkok tersebut dengan menggunakan indikator yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Mark Leonard et al. Hal ini tidak tumpang tindih dengan artikel kelima yang berjudul *Coronavirus (COVID-19) pandemic: Pros and cons of China's soft power projection*, karena penelitian tersebut diterbitkan pada 2021 dan isinya pun tidak menunjukkan pengukuran keberhasilan suatu diplomasi publik dengan menggunakan indikator-indikator.